# Parlementaria



3 Indonesia Siap Jadi Mitra Negara Pasifik



4 Parlemen Pastikan Keamanan dan Stabilitas Pasifik



Perdamaian Hingga Sosial **Budaya Jadi** Bahasan



Persamaan Karakteristik Jadi Kekuatan Regional **Pasifik** 

Nomor 1305/II/VIII/2024 Agustus 2024











### Hubungan Strategis RI dan Negara-Negara Pasifik

angkaian Sidang Indonesia-Pacific Parliamentarv Partnership (IPPP) ke-2 yang dihelat di Jakarta, Indonesia telah resmi ditutup pada Kamis (25/7). Pertemuan Parlemen Indonesia dengan parlemenparlemen negara Pasifik tersebut menghasilkan rekomendasi dalam mendorona konektivitas regional dan pembangunan inklusif antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik.

Ketua DPR RI Puan Maharani 🦻 mengapresiasi kontribusi yang positif dari para perwakilan parlemen selama rangkaian agenda berlangsung. Pada kesempatan yang sama, Puan mengingatkan kepada perwakilan parlemen yang hadir mengenai peran krusial parlemen untuk mempercepat terjadinya konektivitas regional dan pembangunan yang inklusif. Hal ini penting untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masvarakat luas.

"Saya meyakini berbagai inisatif (dalam forum IPPP)



Ketua DPR RI Puan Maharani saat Sidang Kedua IPPP berlangsung.

dapat memberikan manfaat yang dirasakan nyata bagi masyarakat di kawasan. Pada akhirnya, berkontribusi bagi terciptanya kawasan yang terbuka, stabil. inklusif, dan sejahtera untuk masyarakat juga," tutur Puan saat menutup perhelatan Sidang Kedua IPPP di Jakarta, Kamis (25/7).

Menyampaikan hasil kesimpulan IPPP ke-2, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengatakan, rekomendasi pertama adalah Indonesia dan negara-negara Pasifik mengakui pentingnya diplomasi dan dialog parlemen. Kedua, IPPP menekankan perlunya mempromosikan hubungan sosialbudaya dan menjunjung tinggi rasa hormat terhadap kedaulatan dan

> Ketiga, IPPP mendorong promosi ekonomi biru sebagai sarana untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Terakhir, setiap anggota IPPP akan memastikan dialog berkelanjutan. Semuanya scan QR demi meningkatkan hubungan strategis antara parlemen di negara-negara Pasifik. 🗫 bia/aha

integritas teritorial masing-masing.





### Indonesia Siap Jadi Mitra Negara **Pasifik**



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat menutup perhelatan Sidang Kedua Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

etua DPR RI Puan Maharani menyatakan Indonesia berkomitmen menjadi mitra pembangunan negaranegara di kawasan Pasifik. Hal ini dirinya sampaikan saat menutup perhelatan Sidang Kedua Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di Jakarta, Kamis (25/7).

'Secara keseluruhan, pertemuan berjalan sukses dan konstruktif. Sebanyak 12 negara, termasuk 7 Ketua Parlemen hadir dalam pertemuan. Ini sungguh merupakan capaian penting, terutama bagi Indonesia dalam memperkuat hubungan dengan negara-negara Pasifik," ucap Puan.

Dirinya mengatakan, IPPP berpotensi mendorong kemitraan parlemen negara-negara Pasifik untuk menanggapi sejumlah tantangan regional. "Selama pertemuan IPPP, kita berhasil mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi dan cara mengatasinya oleh Indonesia dan negara-negara Pasifik seperti perubahan iklim, maritim, kerja sama ekonomi, SDGs, keamanan dan perdamaian, hingga konektivitas wilayah," urai Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

'Saya melihat adanya kesamaan pandangan akan keinginan kuat kita semua untuk membangun hubungan yang konstruktif yaitu hubungan yang bersahabat dan menghargai kedaulatan dan kesatuan teritori masing-masing negara kita," pungkasnya. --- um/rdn





#### **PENGAWAS UMUM**

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**WAKIL PENGARAH**Suprihartini S.IP., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

**PIMPINAN PELAKSANA**Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI M. Ibnurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website) Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media) Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

**REDAKTUR**Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom, Libaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa' diyah, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syalrrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balgeys Maeshyntha, Anju Alfonco Sitompul, Zulfikar Mubien, Yasmin Nabila

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldi Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri

ANALIS MEDIA Supian, S.E., Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sox, Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunanya, Fahmi Harfa, Saftiri Restu Midyowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska

**INFOGRAFIS** Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

**ADMINISTRASI** Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

#### **PENERBITAN**

PIMPINAN PENERBITAN Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

**DESAIN GRAFIS** 

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

**ADMINISTRASI** 

**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI** Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO **DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN** 

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)



## Parlemen Pastikan Keamanan dan Stabilitas Pasifik



Wakil Ketua DPR bidang Politik dan Keamanan Lodewijk F. Paulus Pertemuan Kedua IPPP (25/7).

i tengah dinamika ketidakstabilan geopolitik dan persaingan kekuatan-kekuatan besar, DPR RI bersama parlemen-parlemen negara Pasifik berusaha membangun komitmen yang kuat demi memastikan keamanan, stabilitas, dan perdamaian regional. Upaya ini dinilai turut mempengaruhi kekuatan kerja sama regional.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus dalam Pertemuan Kedua Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang digelar di Jakarta, Kamis (25/7). Sebab itu, ia

mendorong adanya kemitraan, kerja sama, dan kolaborasi di seluruh kawasan Pasifik.

"Saya percaya bahwa diplomasi parlemen memainkan peran penting untuk berkontribusi pada kemajuan dan kemakmuran kawasan melalui dialog yang terbuka dan inklusif, dengan tetap menghormati kedaulatan nasional semua negara," ucap Lodewijk dihadapan forum.

Lebih lanjut, Politisi F-Partai Golkar itu berharap forum ini bisa berkomitmen memperkuat keterlibatan dengan kawasan Pasifik di bawah gagasan 'Pacific Elevation'. Harapannya, bisa berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat

di kawasan tersebut.

Di sisi lain, Lodewijk menambahkan keterlibatan Indonesia dengan kawasan Pasifik telah tercermin dalam *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP). Pandangan AIOP tersebut, sebutnya, menjadi landasan dari visi Pasifik yang terintegrasi dan saling terhubung.





### Perdamaian Hingga Sosial Budaya Jadi Bahasan



Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Putu Supadma Rudana usai opening ceremony Sidang IPPP ke-2, di Hotel Fairmount, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

ndonesia kembali menggelar Sidang Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 yang dihelat pada 24-26 Juli 2024 di Jakarta. Pada pertemuan tersebut, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengungkap setidaknya ada tiga isu penting yang akan didorong untuk menjadi komitmen bersama.

"Kami dari kemarin sudah menerima mereka untuk bertemu, menyambut mereka, lalu soft diplomacy pendekatan seni budaya, kita berharap ini mendekatkan hubungan kita dengan mereka," kata Putu di Jakarta, Kamis (25/7).

Isu pertama adalah mengenai perdamaian dan keamanan kawasan. Ia menggarisbawahi perdamaian dan keamanan kawasan menjadi modal utama terbesar dalam hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik.

Isu kedua adalah isu mengenai pembangunan kerja sama ekonomi yang inklusif. Hal ini menurutnya penting dimana masyarakat diharapkan dapat terlibat dan mendapatkan manfaat dari kerja sama ekonomi tersebut.

Selain itu, konsep ekonomi biru atau yang juga dikenal sebagai ekonomi laut atau ekonomi maritim, juga akan terus dikawal dalam pembahasan bersama negaranegara Pasifik. Hal ini mengingat Indonesia dan negara-negara Pasifik memiliki kawasan laut yang begitu luas.

Lebih lanjut, isu ketiga adalah mengenai kerja sama dalam bidang sosial dan budaya. Dalam hal ini pendidikan, pariwisata dan hubungan antar juga menjadi perhatian penting dalam diskusi dengan parlemen-parlemen negara Pasifik. Dimana, Indonesia sendiri, lanjut Putu, selalu berkomitmen dalam pemerataan pembangunan.

🗫 bia/aha





### Persamaan Karakteristik Jadi Kekuatan Regional Pasifik

akil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Gilang Dhielafararez, mengungkapkan persamaan karakteristik dan budaya menjadi kekuatan tersendiri bagi Indonesia untuk membuka dan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara Pasifik.

"Indonesia, khusus Indonesia bagian Timur berada di wilayah yang berdekatan dengan negara-negara kepulauan di Pasifik. Sehingga memiliki karakteristik dan budaya yang mirip (hampir sama). Itu tentu menjadi sebuah kekuatan untuk membuka hubungan dan meningkatkan kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Pasifik," ujar Gilang di sela-sela pertemuan sidang kedua Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP), di Jakarta, Kamis (25/7).

Hal tersebut menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini akan memudahkan negara-negara Pasifik, termasuk Indonesia untuk membuka



Wakil ketua Badan Keras Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Gilang Dhielafararez di sela-sela pertemuan sidang kedua Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP), di Jakarta , Kamis (25/7/2024).

dan meningkatkan konektivitas di antara negara. tersebut. Misalnya, dengan membuat penerbangan langsung dari negara Pasifik ke berbagai daerah di Indonesia.

Meski demikian, lanjut Gilang, tentu ada dampak yang juga harus diantisipasi dari rencana peningkatan kerjasama Indonesia dengan negara-negara Pasifik lainnya. Sebut saja peningkatan keamanan daerah-daerah wilayah timur Indonesia.

Pasalnya, tak dapat dipungkiri dengan lebih terbukanya hubungan kerja sama, Maka ada kemungkinan juga terjadi peningkatan kriminalitas di daerah tersebut.

"Tentu keamanan juga harus lebih ditingkatkan. Itu sebagai bagian dari langkah antisipatif dari rencana meningkatnya hubungan kerja sama Indonesia dan negara-negara Pasifik. Ini PR (pekerjaan rumah) Polri, TNI dan tentu kita semua. Demi hubungan kerja sama yang lebih erat lagi, dan peningkatan ekonomi antar negara-negara Pasifik," paparnya.







### Rekomendasi Strategi Tingkatkan Konektivitas Pasifik



Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Puteri Anetta Komarudin di sela-sela sidang IPPP, di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

idang Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) kembali digelar untuk kedua kalinya di Indonesia. Dalam sesi II diskusi antara Indonesia dengan parlemen-parlemen negara Pasifik yang bertema 'Connecting Our Seas and People: Opportunities and Challenges', Indonesia menyarankan berbagai strategi untuk meningkatkan konektivitas Pasifik.

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Puteri Anetta Komarudin menjelaskan, strategi pertama adalah memperkuat kerja sama regional dengan membangun pendekatan kolaboratif untuk meningkatkan infrastruktur maritim dan berbagai praktik terbaik. "Kedua, investasi berkelanjutan, berfokus pada infrastruktur maritim berkelanjutan untuk manfaat lingkungan dan ekonomi jangka panjang," kata Puteri di sela-sela sidang IPPP, di Jakarta, Kamis (25/7).

Strategi ketiga adalah integrasi teknologi dengan memanfaatkan platform digital untuk manajemen pelabuhan guna meningkatkan efisiensi. Keempat, ketahanan iklim dengan melakukan penilaian risiko dan langkah adaptasi iklim untuk memperkuat ketahanan dalam transportasi maritim.

Kelima, pembangunan kapasitas, melatih para profesional maritim dalam praktik dan teknologi berkelanjutan. Terakhir, kita harus mempromosikan pertukaran budaya dan hubungan antar manusia melalui acara bersama dan program pendidikan.

"Melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, pertukaran pengetahuan, dan implementasi kebijakan ekonomi biru yang tangguh, Indonesia berupaya menumbuhkan ekonomi biru yang berkembang untuk manfaat generasi sekarang dan masa depan, melestarikan keanekaragaman hayati dan warisan budaya yang kaya di lautan," tutup Puteri. bia/rdn



### Kemitraan RI-Tuvalu Jadi Opsi Hadapi Isu Perubahan Iklim



Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menggelar pertemuan bilateral dengan perwakilan dari Parlemen Tuvalu, Seve Paeniu, di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta pada Kamis [25/7/2024].

etua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menggelar pertemuan bilateral dengan perwakilan dari Parlemen Tuvalu, Seve Paeniu, di Jakarta pada Kamis (25/7). Perubahan iklim dan konektivitas regional menjadi dua isu yang diulas selama pertemuan berlangsung.

Menghadapi tantangan yang sama sebagai negara kepulauan, DPR RI dan Parlemen Tuvalu bersepakat untuk mendukung satu sama lain. Sebab itu, membangun hubungan kemitraan menjadi opsi yang ditawarkan oleh masing-masing pihak untuk mengupayakan terjadinya tindakan kolektif.

"Kami menghadapi persoalan yang sama. Perubahan iklim. Ini masalah serius. Kami juga menghadapi masalah konektivitas regional. Ini yang menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama," ungkap Fadli Zon.

Perlu diketahui, Tuvalu memiliki 9 pulau, yang mana 40 persen telah terendam akibat perubahan iklim. Sebanyak 12.000 penduduk terancam dalam bahaya. Akibat belum maksimalnya pembangu nan konektivitas di udara, laut, dan darat, membuat Tuvalu masuk dalam klasifikasi negara yang minim sumber daya.

Maka dari itu, baik DPR RI dan Parlemen Tuvalu menawarkan opsi kemitraan. Politisi F-Partai Gerindra ini berharap opsi kemitraan ini menjadi salah satu solusi yang ampuh bagi kedua negara.

Adanya Sidang Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ini, sebutnya, membuat parlemen-parlemen kawasan Pasifik bisa menunjukan kontribusi aktif menghadapi tantangan regional dan global. "Sebagai wakil rakyat, kita harapkan parlemen menjadi semacam jembatan antar masyarakat untuk menghadapi tantangan regional dan global," tandasnya. — um/aha







### RI dan Negara Kawasan Pasifik Perkuat Kolaborasi



Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Sukamta di sela-sela agenda berkeliling gerai kerajinan tangan dan kuliner khas Papua yang turut memeriahkan perhelatan Pertemuan Kedua Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang digelar di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).

akil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Sukamta, m e n y a t a k a n Indonesia siap menjalin kemitraan dengan negara-negara pasifik. Memiliki karakteristik sumber daya yang kaya, ungkapnya, setiap negara perlu saling berkolaborasi untuk membangun konektivitas regional yang erat.

Demikian pernyataan ini dirinya utarakan di sela-sela agenda berkeliling gerai kerajinan tangan dan kuliner khas Papua yang turut memeriahkan perhelatan Pertemuan Kedua Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang digelar di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/7). Menurutnya, kemitraan Indonesia dengan negara-negara pasifik ini bisa membuka kesempatan untuk mempelajari dan bertukar pengalaman terbaik.

"(Kemitraan) ini membuka peluang yang besar. Indonesia dan negara-negara pasifik siap melakukan 'partnership' (lalu) bersama-sama berproses untuk mengembangkan potensinya," ucap Sukamta kepada **Parlementaria**.

Sebagai informasi, Indonesia,

sebagai tuan rumah kedua kalinya dari IPP, memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnis, termasuk Melanesia yang tinggal di lima provinsi di Indonesia (Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur). Tidak hanya itu saja, warisan budaya Indonesia yang kaya menjadi bukti kekuatan yang berasal dari persatuan dalam keberagaman.

"Adanya IPPP ini, Indonesia dan negara-negara pasifik membangun jejaring kerja sama yang lebih kokoh dan menciptakan solusi inovatif untuk menghadapi tantangan regional," pungkas Sukamta. um/aha



### Delegasi IPPP Pelajari Inovasi Teknologi Bersama **IPB** University



Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon di hari terakhir penyelenggaraan Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2, Jumat (26/7/2024), para delegasi dari parlemen antarnegara pasifik diajak untuk berkunjung ke Science and Techno Park IPB University.

ihariterakhir penyelenggaraan Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2, Jumat (26/7), para delegasi dari parlemen antar negara pasifik diajak untuk berkunjung ke Science and Techno Park IPB University. Dalam agenda field trip ini, para delegasi disambut langsung oleh Rektor IPB University, Arif Satria, untuk studi banding dan belajar mengenai pendirian perusahaan rintisan (start-up)

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengatakan parlemen memiliki fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. Namun, dalam menjalankan tugas tersebut,

parlemen tidak dapat bekerja sendiri, sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain seperti universitas sebagai sektor pendidikan juga sangat penting.

Untuk itu, kunjungan ke IPB University merupakan perluasan dari komitmen parlemen untuk mewujudkan tujuan yang dihasilkan dari pertemuan selama penyelenggaraan Sidang ke-2 IPPP. Hal itu terkait memberikan wawasan praktis tentang bagaimana inovasi, teknologi, dan penelitian serta pengembangan yang dapat mendorong menuju masa depan yang lebih sejahtera, stabil, dan berkelanjutan.

"Ini menghadirkan peluang signifikan bagi kita untuk mengeksplorasi solusi inovatif dan memperkuat upaya kolaboratif di bidang-bidang tersebut, dimana universitas ini (IPB University) juga fokus pada pertanian, pangan, kelautan, dan biosains tropis," kata Fadli usai field trip di IPB University, Bogor, Jawa Barat.

Ke depan, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini berharap baik IPPP maupun Parlemen Indonesia dapat terus menjalin hubungan dengan universitas dan melakukan pertukaran ide yang efektif dan teratur. "Kita harus membangun koalisi yang kuat yang mendukung inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan bagi semua orang," jelasnya. 🗫 bia/rdn









Anggota Grup Keria Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Fiji Ongku P Hasibuan saat pertemuan di Jakarta, Jumat (26/7/2024).

### Komitmen RI Perkuat Kerja Sama Ekonomi dengan Fiji

nggota Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen Fiji, Ongku P Hasibuan, mengadakan pertemuan dengan Delegasi Parlemen Fiji di Jakarta. Pertemuan ini menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama di bidang ekonomi dengan Fiji sebagai bagian dari visi Pacific Elevation untuk menciptakan kawasan Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera.

Sebagai salah satu negara pemimpin di Kawasan Pasifik, Fiii adalah sahabat dan mitra penting bagi Indonesia untuk membangun kawasan ini. Oleh karena itu, kerja sama antara Indonesia dan Fiji yang telah terjalin dengan baik harus terus ditingkatkan," ujarnya saat pertemuan di Jakarta, Jumat (26/7).

la juga menyampaikan apresiasi terhadap pembentukan Fiji-Indonesia Friendship Association yang bertujuan mempererat hubungan antar masyarakat di kedua negara. "Indonesia ingin kemitraan dengan Fiji dan negara-negara kawasan Pasifik menjadi kesempatan untuk membangun masa depan bersama melalui kerja sama yang didasari rasa saling percaya dan saling menghormati," katanya.

Pertemuan ini juga menyoroti pentingnya melibatkan generasi muda dalam setiap bidang kerja sama yang dikembangkan. "Kita

perlu memastikan bahwa setiap bidang kerja sama yang kita kembangkan telah memperhatikan dan melibatkan kepentingan generasi muda," tambahnya.

Selanjutnya, la juga mengajak parlemen Fiji untuk bersama-sama mendorong pemerintah masingmasing negara melanjutkan pembicaraan Preferential Trade Agreement (PTA) yang pada tahun 2022 telah disetujui untuk dibentuk.

"PTA merupakan aspek penting untuk mewujudkan kemitraan perdagangan dan ekonomi yang lebih erat, serta memfasilitasi kerja sama antar pelaku ekonomi, termasuk dari sektor UMKM dari kedua negara," terangnya. 🗫 aha







### ATURAN PENYEDIAAN **ALAT KONTRASEPSI** PADA REMAJA

Aturan penyediaan alat kontrasepsi pada remaja tertuang pada aturan pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

#### Pasal 103 Mengatur pelayanan kesehatan reproduksi. isinya:

Ayat 1: "Upaya Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta Pelayanan Kesehatan reproduksi."

Ayat 2: Mengatur pemberian komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi

Ayat 3: Pemberian komunikasi,informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi bisa melalui bahan ajar dan kegiatan lain di sekolah.

Ayat 4: Pelayanan kesehatan reproduksi meliputi lima hal, termasuk penyediaan alat kontrasepsi

Ayat 5: Konseling dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, atau konselor dengan memperhatikan privasi dan kerahasiaan.

"Pemerintah harus memberikan penjelasan yang jelas dan mendetail mengenai kebijakan ini, dengan menekankan bahwa penyediaan alat kontrasepsi merupakan langkah preventif untuk kesehatan reproduksi dan bukan untuk mendorong perilaku seks bebas"



Hetifah Sjaifudian Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Sumber: Berbagai Sumber



### Apresiasi Baznas Jateng Turut Entaskan Kemiskinan

akil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke kota Surakarta, Jawa Tengah. Salah satu agenda Kunker tersebut adalah mengunjungi Baznas Kota Surakarta guna menyerap aspirasi para kyai dalam penguatan pengumpulan zakat. khususnya di Jawa Tengah.

"Kami mengunjungi Baznas Kota Surakarta, binaan Baznas Provinsi Jawa Tengah sekaligus Ketua MUI Jawa Tengah. (Berdasarkan) paparan dari Baznas Kota Surakarta Jawa Tengah meminta kepada Komisi VIII DPR RI untuk dapat melanjutkan ke pemerintah (Basnaz pusat) agar diberi penguatan ke Basnaz daerah khususnya Jawa Tengah," ujar Abdul Wachid di Surakarta, Jawa Tengah, Senin (15/7).

Legislator Fraksi Partai Gerindra ini mengapresiasi program-program Baznas dalam



Tim Kunres Komisi VIII dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid saat menyalurkan bantuan di kota Surakarta, Jawa Tengah.

pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Hal itu untuk menyadarkan para Muzakki terkait program yang dibuat Basnaz terutama untuk pegawai di lingkungan Kementerian BUMN yang sudah mampu untuk berzakat.

"Program-programnya yang sudah dibuat oleh baznas agar dipantau terutama untuk PNS dan non PNS yang sudah mampu untuk berzakat, juga kepada Kementrian BUMN. Ini penting untuk hadir di dalam Baznas dan juga kementerian yang lain termasuk tadi disampaikan di KH. Ahmad Daroji yaitu di Kementerian Agama juga termasuk UIN. Agar memberikan zakatnya kepada Basnaz," ujarnya.

Abdul Wachid menambahkan bahwa program Basnaz ini sudah bagus, apalagi terdapat salah satu program pengentasan kemiskinannya memberikan modal usaha untuk para asnaf. "Sehingga program baznas tidak hanya menerima zakat tetapi, akan memberi (menyalurkan) zakat pada asnaf dalam bentuk program tersebut tadi," jelasnya. 🗫 mri/rdn





### Masih Ditemukan Penerima Bansos Tak Sesuai Pendataan

etua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi menegaskan data keluarga penerima bantuan sosial di Manado harus sesuai. Menurutnya masih banyak masyarakat atau warga yang sebenarnya tidak layak menerima tapi masih menerima.

"Kementerian Sosial tahun ini mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp77 triliun lebih, sebenarnya sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2024 sebesar Rp78 triliun," kata Ashabul di Manado, Selasa (16/7).

Politisi PAN tersebut menjelaskan, dari Rp77 triliun ini sebesar Rp75,9 triliun atau hampir Rp76 triliun itu peruntukannya adalah bantuan sosial. "Penerima bantuan sosial ini terdiri dari sebanyak 10 juta penerima PKH KPM, kemudian sebanyak 18,8 juta penerima bantuan sembako. Jadi totalnya sebanyak 28,8 juta," ujarnya.

Menurutnya pula, apabila melihat jumlah ini sebenarnya sudah linear dengan jumlah data kemiskinan yang ada di BPS. Sehingga kata Ashabul, dengan atensi bantuan ke KPM dan penerima bantuan sembako sesungguhnya pemenuhan kebutuhan dasar melalui Kementerian Sosial ini sudah cukup, belum lagi bantuan dari kementerian lainnya.

"Tapi persoalannya, fakta di lapangan tidak demikian disaksikan. Karena dalam kunjungan kerja, reses atau ketemu konstituen ternyata ada yang belum pernah sama sekali menerima bantuan yang seharusnya menerima," sebutnya.

la menambahkan, sudah menjadi tanggung jawab semua pihak terkait untuk segera memperbaiki data penerima bansos.

"Nah inilah mungkin menjadi tanggung jawab kita semua, menjadi tugas semua kita sehingga data-data ini betul-betul bisa clear. Mereka yang memang berhak menerima, menerima. Sementara yang sudah tidak bisa menerima, tidak usah lagi," katanya. 🗫 tn/aha



Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi saat menyerahkan bantuan sosial di Manado, Selasa (16/7/2024).





### **Pemerintah** Jangan Anaktirikan **Pesantren**



Anggota Komisi VIII DPR RI, I Komang Koheri saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VIII DPR RI ke Kota Palembang, Sumatera Selatan, Senin (15/7/2024).

RI ke Kota Palembang, Sumatera Selatan, Senin (15/7).

Politisi Fraksi Partai PDI-Periuangan tersebut mengatakan hal itu karena adanya temuan bahwa terjadi kurang merata penyaluran Dana BOS dan PIP Pesantren, serta sarana dan prasarana pesantren vang masih banyak dinilai kurang memadai.

"Juga tadi tidak meratanya untuk bantuan BOS ya seperti juga pendidikan umum, lalu juga mengenai sarana dan prasarananya. Padahal pondok pesantren, pendidikan agama ini sangat diminati oleh masyarakat Sumatera Selatan," tuturnya.

Lebih lanjut, Komang mendorong agar Dana BOS dan PIP untuk pesantren dapat ditingkatkan. la pun merasa permasalahan ini harus dibawa ke Badan Anggaran untuk dibicarakan lebih lanjut lagi. "PIP itu kami akan minta ditingkatkan jumlahnya. Oleh karena itu kita akan membawa aspirasi. Agar pendidikan agama, khususnya pondok pesantren ini dapat ditingkatkan," tutupnya. vsm/rdn

nggota Komisi VIII DPR RI. I Komang Koheri meminta Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun daerah, sejatinya harus memperhatikan keberadaan pondok pesantren dan madrasah. Jangan sampai, tegasnya, pondok pesantren dan madrasah dianaktirikan.

"Seharusnya pondok pesantren ya pendidikan keagamaan itu tidak dianaktirikan. Karena mereka juga generasi-generasi muda, generasi generasi penerus kita. Jadi di pondok pesantren, di pendidikan keagamaan untuk memecahkan juga permasalahan-permasalahan bangsa kita di masa depan," ujar Komang usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VIII DPR





### Minahasa Utara Layak Jadi Contoh UHC Kabupaten Lain



Anggota Komisi IX DPR RI, Nur Nadlifah saat mengikuti Kunjungan Kerja Masa Reses (Kunres) Komisi IX DPR RI ke Kantor Bupati Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (17/07/2024).

naaota Komisi IX DPR RI, Nur Nadlifah, menyampaikan pentingnya pencapaian *Universal* Health Coverage (UHC) dalam kunjungan kerja masa reses Komisi IX yang dilakukan di Minahasa Utara. Ia menjelaskan bahwa Minahasa Utara merupakan salah satu kabupaten yang sudah mencapai UHC, karenanya hal itu menjadi sebuah pencapaian yang harus dicontoh oleh kabupaten atau kota lainnya di Indonesia.

"Penting sekali, kabupaten (yang lain) itu harus kejar capai Universal Health Coverage (UHC). Kalau mau melindungi masyarakatnya," kata Nur Nadlifah usai mengikuti Kunjungan Kerja Masa Reses (Kunres) Komisi IX DPR RI ke Kantor Bupati Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Rabu (17/7).

Politisi Partai PKB menjelaskan bahwa tanpa UHC, masyarakat yang memiliki BPJS tetapi tidak aktif akan membutuhkan waktu 14 hari kerja untuk aktivasi. Dengan UHC, masyarakat akan langsung di-cover oleh Pemerintah Daerah tanpa masa aktivasi.

"Karena kalau masyarakatnya tidak UHC pada saat kepesertaan ini tidak aktif perlu 14 hari kerja untuk aktivasi. Jadi, kalau ada orang punya BPJS, terus masuk rumah sakit, kebetulan tidak aktif, menunggu 14 hari lagi baru bisa dipakai. Dan itu (juga perlu) bayar tunggakan-tunggakan. Artinya, orangnya sudah pulang, baru bisa menggunakan BPJS," tambahnya.

Nur Nadlifah juga mendorong para kepala daerah untuk memperhatikan kepesertaan BPJS di wilayah mereka dan mengalokasikan anggaran untuk mencapai UHC. Tak hanya itu, ia juga menekankan agar pentingnya fasilitas layanan kesehatan yang memadai. --- aas/rdn





### luran Disesuaikan dengan Kemampuan Finansial **Masyarakat**

ingkat Kepesertaan BPJS Kesehatan saat ini dinilai masih minim. Hal itu lantaran masih beratnya iuran, khususnya, jika berada dalam satu keluarga yang memiliki jumlah anggota keluarga vang banyak.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Itet Tridjajati mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus mencari solusi atas kendala kepesertaan BPJS Kesehatan tersebut. Misalnya, dengan terbitnya Pertaruran Daerah (Perda) yang mengatur bahwa iuran BPJS Kesehatan ditentukan berdasarkan kemampuan finansial dalam satu keluarga.

"Banyak dari masyarakat tidak menjadi anggota BPJS Kesehatan karena dari mereka harus membayar sejumlah keluarganya. Kan jadi mahal. Saya usul untuk menjadi anggota BPJS (iurannya) harus berdasarkan kemampuan finansialnya," katanya saat kunjungan kerja reses Komisi IX ke Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Rabu (17/7).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengungkapkan bahwa kendala tersebut merupakan kegelisahan dari masvarakat untuk meniadi peserta BPJS Kesehatan. Dikarenakan rendahnya pendapatan dan tak menentu per hari nya, misal buruh dan pekerja informal lainnya.

"Misalnya buruh. Mereka untuk makan sehari-hari saja sudah susah apalagi diminta untuk membayar BPJS sejumlah dengan yang ada di kartu keluarga, tentu ini harus ada solusinya. Karena permasalahan ini rata-rata ada di tiap daerah," tambahnva.

Karena itu, politisi dari Dapil Lampung II itu meminta agar perwakilan Kemenkes yang hadir dapat menyampaikan kepada Menteri Kesehatan agar segera bisa mengambil langkah konkret dan menemukan solusi dari kegelisahan masyarakat ini. --- cas/rdn





Anggota Komisi IX DPR RI Itet Tridjajati foto bersama usai kunjungan kerja reses Komisi IX ke Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (17/7/2024).

### RSUP Kandou Manado Sudah 40 Pesen Penuhi Kris



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena disela-sela meninjau RS Kandou di Manado, Sulut, Selasa (16/7/2024).

umah Sakit Umum Pusat Kandou di Manado, Sulawesi Utara, dinilai sudah 40 persen memenuhi sistem Kris (kelas rawat inap standar) yang dipersyaratkan sebagai pengganti kelas perawatan 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena usai meninjau RS Kandou di Manado, Sulut, Selasa (16/7). Melki juga menilai, RS milik pemerintah pusat ini sedang melengkapi 12 persyaratan Kris seperti ditetapkan BPJS Kesehatan.

"Kalau kita cermati rumah sakit Kandou yang merupakan milik pemerintah pusat sudah dipersiapkan dengan baik untuk

menyelenggarakan programprogram Kementerian Kesehatan. Kalau kita bicara Kris hasil diskusi dengan Ibu direktur tadi sudah berjalan, sudah mendekati hampir 40 persen dan akan menuju memenuhi 12 kriteria yang

disyaratkan," ungkapnya.

Politisi Partai Golkar itu. menyerukan agar semua RS menyiapkan diri menjadi ujung tombak pelaksanaan berbagai program kesehatan, terutama sistem Kris. --- mh/aha

NH SAKIT KANDOU YANG MERUPAKAN MILIK PEMERINTAH PUSAT SUDAH DIPERSIAPKAN DENGAN BAIK UNTUK MENYELENGGARAKAN PROGRAM-PROGRAM KEMENTERIAN KESEHATAN. KALAU KITA BICARA KRIS HASIL **DISKUSI** 





### Jangan Sampai Ada Fasilitas Olahraga Terbengkalai



Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin saat Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

nggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin menilai perlu ada pemeliharaan serius terhadap setiap fasilitas vang digunakan pada Pekan Olahraga Nasional (PON). Hal itu dalam rangka menjaga keberlanjutan dan manfaat jangka panjang dari infrastruktur yang berasal dari uang negara.

"Kami tidak mau seperti terjadi di beberapa tempat, setelah PON selesai, fasilitas menjadi rusak dan terbengkalai," tegas Djohar usai meninjau lokasi pembangunan Sumut Sport Center di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (12/7).

la menekankan bahwa setelah PON berakhir, banyak fasilitas olahraga terbengkalai karena kurangnya perawatan. Tidak ada pemeliharaan, sehingga proyek yang begitu besar, memakan uang yang begitu banyak, terbengkalai, tersia-siakan," ungkapnya.

Legislator Dapil Sumut III

tersebut juga mengemukakan solusi konkret untuk memaksimalkan penggunaan stadion dan fasilitas lainnya usai penyelenggaraan PON. "Oleh karena itu, saya minta ada langkah-langkah membuat stadion bisa dipakai umum," kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Salah satu usulannya adalah mengubah ruang-ruang di bawah tribun menjadi aula yang dapat disewakan untuk berbagai acara seperti pernikahan dan kegiatan komunitas lainnya. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Fagih. Ia mendorong adanya kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti Universitas Negeri Medan (Unimed) untuk memaksimalkan pemanfaatan venue ini untuk kegiatan pendidikan dan olahraga.

uf/rdn





### Jumlah Sekolah Negeri Terbatas, Sementara Bangun Jalan Saja Bisa



Anggota Komisi X DPR RI Lisda Hendrajoni saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X ke Banda Aceh, Provinsi Aceh, Jumat (12/07/2024).

nagota Komisi X DPR RI Lisda Hendrajoni menyayangkan masih adanya beberapa persoalan pendidikan di Indonesia yang belum terselesaikan. Misalnya, terdapat ketimpangan antara sekolah favorit dan tidak, sehingga para orang tua akan berlomba memasukkan anaknya ke sekolah favorit tersebut.

Karena itu, Lisda menilai hal tersebut harus menjadi perhatian bersama. Dimana dunia pendidikan seharusnya bisa menambah jumlah sekolah dengan sarana dan prasarana secara merata dan memadai.

"Persoalannya saat ini, bagaimana peran negara hadir? Adakah niat baiknya atau tidak? Apakah dalam hal ini negara mampu membangun sekolah, memberikan pelatihan-pelatihan kepada guruguru kita? Pasalnya sekolah dan guru-guru yang mempunyai kualitas baik menjadi investasi masa depan bangsa ini, sedangkan untuk membangun jembatan dan jalan tol saja bisa," ujar Lisda usai melakukan Kunjungan Kerja Reses Komisi X ke Banda Aceh, Provinsi Aceh, Jumat (12/7).

Lebih lanjut Politisi Fraksi NasDem menjelaskan saat ini yang terjadi di lapangan adalah bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin berkurang jumlah sekolahnya. Jumlah SD lebih banyak daripada jumlah SMP, dan

iumlah SMP lebih banyak daripada iumlah SMA.

Sehingga, dengan situasi seperti ini akan berdampak pada anak yang tidak kebagian sekolah, terlepas juga masalah ekonomi. Permasalahan seperti ini sudah seharusnya menjadi kewajiban negara agar anak-anak di Indonesia bisa bersekolah semua.

"Kalau seperti ini (jumlah sekolah terbatas) berarti pemerintah mempersiapkan anakanak kita tidak mendapatkan hak pendidikan. Ini betul-betul sudah melanggar UUD 1945, di mana pemerintah harusnya hadir dalam upaya mencerdaskan seluruh anak bangsa," pungkasnya. (rni/rdn) --bia/aha





### Gandeng LKPP, Ajak UMKM Jadi Penyedia Belanja Pengadaan



Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin saat kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Bekasi, Jawa Barat, Jumat (19/07/2024).

ata LKPP mencatat realisasi belanja pengadaan dari Usaha Mikro Kecil (UMK) mencapai Rp427,9 triliun dari total rencana belanja pengadaan pemerintah yang menyentuh lebih dari Rp1.100 triliun. Melihat hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong pelaku UMKM di Kabupaten Bekasi untuk terlibat dalam belanja pengadaan barang/iasa pemerintah.

"Peluang pasar yang terbuka ini harus Bapak/Ibu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena lewat LKPP, produk yang Bapak/

Ibu miliki nantinya bisa tersalurkan melalui mekanisme belanja pengadaan. Dengan begitu, otomatis penjualan produknya bisa semakin

meningkat," ungkap Puteri pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Wilayah Bekasi, Jawa Barat, Jumat (19/7).

Puteri juga berpesan kepada LKPP untuk meningkatkan produk vang tayang di Katalog Elektronik (E-Catalogue), utamanya produk dari pelaku UMKM Kabupaten Bekasi. Apalagi menurut data LKPP, potensi belanja pengadaan pemerintah di Kabupaten Bekasi mencapai Rp2,43 triliun pada tahun 2024.

"Sehingga, setelah mengikuti kegiatan ini, kami harapkan produk milik Bapak/Ibu bisa segera tayang di katalog elektronik supaya penjualannya meningkat. Karena ternyata, belanja pengadaan tidak hanya memberi potensi pasar, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja. Dimana, setiap belanja pengadaan senilai Rp400 triliun diperkirakan bisa membuka 2 juta lapangan kerja," papar Politisi Fraksi Partai Golkar ini. --- rnm/rdn



LKPP UNTUK MENINGKATKAN PRODUK YANG TAYANG DI KATALOG ELEKTRONIK (E-CATALOGUE), UTAMANYA PRODUK DARI PELAKU UMKM KABUPATEN BEKASI. APALAGI MENURUT DATA LKPP, POTENSI BELANJA PENGADAAN PEMERINTAH DI KABUPATEN BEKASI MENCAPAI RP2,43 TRILIUN PADA TAHUN 2024.

Puteri Komarudi



### Tinjau Jamkestama di RS Hermina Banyumanik



Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso, selaku Ketua Tim Kunjungan Keria Reses BURT saat memimpin pertemuan di Rumah Sakit Hermina Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (28/7/2024).

im Kunjungan Kerja Reses Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke RS Hermina Banyumanik untuk memantau pelaksanaan Program Jamkestama. Kunjungan ini bertujuan mengevaluasi peningkatan layanan, infrastruktur, dan teknologi kesehatan di rumah sakit tersebut, serta memastikan pemberian pelayanan terbaik dan pemutakhiran database peserta Jamkestama.

"Pada hari ini, kami Tim BURT DPR RI kembali berkesempatan untuk melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Program Jamkestama bagi Anggota DPR RI Beserta Keluarga ke RS Hermina Banyumanik sebagai salah satu rumah sakit provider PT Asuransi Jasindo di Kota Semarang," kata Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso, Minggu (28/7).

Enam tahun lalu, tepatnya pada

bulan April 2018, BURT yang dipimpin oleh Bapak Hasrul Azwar, juga pernah mengunjungi RS Hermina Banyumanik. Pada kesempatan kali ini, BURT ingin mengetahui perkembangan yang telah dilakukan oleh rumah sakit ini dalam kurun waktu tersebut, terutama dari segi layanan, infrastruktur, dan alat kesehatan.

Agung menekankan pentingnya RS Hermina Banyumanik untuk selalu memberikan pelayanan terbaik dan memperbarui database peserta Jamkestama secara berkala. Hal ini penting untuk menghindari masalah yang mungkin terjadi saat anggota DPR RI dan keluarganya berobat di rumah sakit ini.

"Kami pun ingin mengingatkan kembali bahwa seluruh pihak di RS Hermina Banyumanik harus selalu memberikan pelayanan terbaik serta selalu meng-update database peserta Jamkestama agar tidak terjadi permasalahan saat ada Anggota beserta keluarganya yang berobat di rumah sakit ini." tegas Legislator Dapil Jabar I. mun/aha









Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Indra Iskandar foto bersama saat meninjau produk unggulan UMKM asal Papua dalam Sidang kedua 'Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership' (IPPP). Salah satunya untuk mempromosikan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jakarta, Rabu (24/7/2024).

### Pamerkan Produk Unggulan Papua

ekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, ungkap alasan ikut memamerkan produk unggulan UMKM asal Papua dalam Sidang kedua 'Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership' (IPPP). Salah satunya untuk mempromosikan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

"Sebagai *supporting system* dari DPR RI, Setjen DPR RI telah

siap menggelar sidang kedua IPPP yang merupakan kerja sama parlemen negara-negara Pasifik. Dan beberapa provinsi di Timur Indonesia termasuk dalam wilayah Pasifik, seperti Papua, Papua Barat Daya dan lain-lain," ujar Indra, di Jakarta, Rabu (24/7).

Tak berlebihan jika kemudian dalam event internasional yang digelar di Jakarta itu, Setjen DPR sengaja menampilkan

atau memamerkan produkproduk unggulan dari Papua kepada delegasi IPPP. Selain untuk memperkenalkan budaya Papua, juga sebagai dukungan pengembangan UMKM Papua, yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Papua.

"Saya lihat produk-produk unggulan dari Papua, Papua Barat Daya ini sangat bagus. Semoga bisa menarik perhatian dari para delegasi negara-negara Pasifik dalam event ini. Sehingga ke depan produk unggulan termasuk dari UMKM ini bisa ikut dipasarkan di negara Pasifik. Sehingga ada peningkatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan negaranegara Pasifik, selain juga di bidang Politik," ungkapnya. ---- ayu/aha





SAKSIKAN HANYA DI

http s://tvrparlemen.dpr.go.id

